

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Arab Saudi yang pada awalnya merupakan negara yang sangat bergantung pada pendapatan negara kepada minyak, mengalami defisit yang cukup besar. Hal ini dikarenakan oleh harga minyak yang turun secara drastis pada tahun 2014. Penurunan tersebut kemudian menjadi ancaman bagi kestabilan ekonomi Arab Saudi. Kemudian pemerintah Arab Saudi mengumumkan rencana untuk melakukan pemotongan pengeluaran dan dorongan untuk meningkatkan pendapatan dari sumber non-minyak. Masalah potensial lain yang kemudian dialami oleh Arab Saudi adalah masalah pengangguran. Pada tahun 2030, diperkirakan sekitar 4,5 juta warga negara Arab Saudi yang berusia di bawah 30 tahun akan memasuki usia angkatan kerja. Jumlah ini melebihi jumlah dari warga negara Arab Saudi yang bekerja pada saat ini.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pada tahun 2016 pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan yang bernama *Saudi Vision 2030* untuk mengatasi kondisi minyak yang naik turun dan ancaman bagi perekonomian ekonomi Arab Saudi. *Saudi Vision 2030* merupakan kebijakan untuk melakukan reformasi terhadap pemerintahan Arab Saudi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Arab Saudi melalui investasi di industri non-minyak, diversifikasi ekonomi, dan privatisasi industri milik pemerintah, serta mempekerjakan warga negara Arab Saudi yang berusia muda. *Saudi Vision 2030* memiliki tiga pilar utama, yaitu *A Vibrant Society*, *Thriving Economy*, dan *An Ambition Nation*.

Dalam penelitian ini, melalui kebijakan *Saudi Vision 2030*, peneliti mengidentifikasi bahwa Arab Saudi merupakan negara *late rentier*. Peneliti mengidentifikasi hal tersebut menggunakan konsep *late rentierism*. Sebagai negara *late rentier*, Arab Saudi mendapatkan beberapa dampak yang mengakibatkan proses modernisasi politik di Arab Saudi menjadi terhambat. Terdapat tiga faktor penyebab terhambatnya proses modernisasi politik di Arab Saudi, yaitu faktor pajak, faktor pengeluaran pemerintah, dan faktor larangan untuk berkelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan modernisasi ekonomi dan sosial tidak berdampak terhadap modernisasi politik di Arab Saudi adalah karena adanya faktor penghambat untuk modernisasi tersebut.

## 5.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih belum bisa dikatakan sempurna, akan tetapi peneliti melihat bahwa penyebab terhambatnya modernisasi politik di Arab Saudi adalah berasal dari keinginan pemerintah Arab Saudi untuk berusaha mempertahankan rezim dan sistem pemerintahannya yang monarki. Tindakan pelarangan dan penangkapan bagi yang mengkritisi pemerintah menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat besar dalam menghambat modernisasi politik di Arab Saudi. Untuk itu peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan fokus dan perhatian yang lebih mendalam terhadap tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan langkah-langkah untuk melakukan modernisasi politik.